

Rilis FITRA, Selasa, 26 Juli 2016

Masalah Dana Desa : Transfer Terlambat, Penyunatan dan Penyalahgunaan.

FITRA sejak pembahasan UU Desa terus selalu mengawal hingga kini proses implementasi. Sejak tahun 2015, FITRA membuka posko pelaporan Dana Desa secara Nasional dengan menyertakan 13 simpul jaringan FITRA di daerah. Sejauh ini semester I tahun 2016, FITRA telah menerima banyak laporan masyarakat. Selain itu saat ini FITRA juga terus melakukan penelitian dan pengawasan terkait dengan Dana Desa. Berikut adalah beberapa hasil temuan dan laporan masyarakat :

Pertama, khusus untuk realisasi tahun 2016, bulan Juli ini baru realisasi tahap I sebesar 50 Persen atau Rp. 26,9 Triliun dari total Rp. 46 Triliun. Seharusnya transfer dana desa tahap pertama mencapai 60 persen dari pagu dalam APBN. Saat ini, dari 434 Desa terdiri dari 74.000 Desa, sebanyak 414 Daerah tercatat belum menerima karena alasan administratif. Kementerian keuangan beralasan Pemerintah daerah belum menyerahkan syarat administrasi yaitu APBDes, RKPDDes, dan Pertanggungjawaban Dana Desa.

Catatan FITRA : keterlambatan ini adalah kebiasaan lama yang terus berlarut dari Pemerintah. Sebelumnya tahun 2015, untuk mengantisipasi keterlambatan ini maka diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk Percepatan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Kementerian yaitu Kemendes, Kemendagri dan Kemenkeu.

Kedua, baru baru ini di Kabupaten Bangkalan Madura, Polisi Melakukan Operasi Tangkap Tangan kepada oknum Camat yang melakukan penyunatan dalam proses pencairan dana Desa. Ternyata, data penyunatan tersebut hasilnya dibagikan kepada beberapa oknum dan jaringan birokrasi. Berikut adalah data pemotongan Dana Desa di bangkalan.

Besar Pemotongan mencapai Rp. 110 juta per desa (22 desa), berikut adalah rincian potongan dan modus pembagian potongan :

Keterangan	Jumlah
Rencana Anggaran Biaya	Rp. 1.500.000
Polsek Koramil	Rp. 400.000
Hutang PKK	Rp. 1.450.000
Proposal	Rp. 200.000
PPN dan PPh (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan)	Rp. 43.000.000
Papan informasi	Rp. 2.200.000
Perpustakaan	Rp. 25.000.000
Bina Kelurga Lansia 8%	Rp. 30.194.448
Kecamatan 1,5%	Rp. 5.661.454
Total:	Rp.110.805.902

Catatan FITRA : terkait pemotongan dana desa ini, sebelumnya telah diprediksi oleh FITRA pada tahun 2015. Bahkan secara khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan riset investigasi dan hasilnya sama bahwa ada potensi pemotongan dana desa dari oknum Pemda, baik saat Pilkada ataupun tidak. Masalahnya Kemendes abai terhadap alarm dari masyarakat dan KPK ini.

Ketiga, terjadi penyalahgunaan dana desa oleh aparaturnya desa. Laporan masyarakat dan Berdasarkan temuan FITRA di 15 Kabupaten setidaknya terdapat kerugian mencapai Rp. 4,9 Miliar, rata-rata modus yang dilakukan aparaturnya desa adalah pemotongan anggaran, *mark up*, dan pemalsuan tanda-tangan. Ada juga yang tertangkap karena masalah kesalahan administrasi dan tidak sesuai dengan peruntukan. Jika masalah ini tidak diperbaiki maka akan banyak lagi kepala desa yang tertangkap, efeknya bagai aparaturnya desa, ketakutan kepala desa dalam penggunaan/menganggarkan alokasi DD sehingga program pembangunan desa tidak berjalan dengan baik.

Catatan FITRA : dalam riset FITRA dan KPK juga merekomendasikan agar potensi penyalahgunaan dana desa ini di minimalisir melalui pengawasan yang ketat dari Kemendes. Sayangnya, hal ini diabaikan sehingga beberapa pelanggaran terus terjadi. Namun sebenarnya, Kemendes telah membentuk Satgas Dana Desa tahun 2015, namun kerjanya sampai saat ini belum terasa khususnya terkait pengawasan dan pengawalan dana desa.

Keempat, parahnya Badan Anggaran (Banggar) DPR justru mengusulkan penyaluran dana desa tidak diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Alasan Banggar konon agar pencairan dana desa cepat terlaksana.

Catatan FITRA : FITRA menilai, Banggar tidak update dan solusi yang ditawarkan tidak relevan karena masalah utama sebenarnya ada di administrasi dan koordinasi antar kementerian yaitu Kemendes, Kemendagri dan Kemenkeu.

Rekomendasi FITRA

1. Perlu kerja keras Kemendes dalam mengawal implementasi dana desa agar tidak terjadi penyuntatan dan penyalahgunaan di daerah. Sejauh ini FITRA menilai kurang fokus dan lambat dalam proses mengawal dan mengawasi ini.
2. Apakabar Satgas Desa, kerjanya harus disampaikan secara transparan dan akuntabel ke masyarakat.
3. Kemendagri juga harus terlibat dalam menyiapkan aparat pemerintah daerah agar seutuhnya dana desa dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah desa untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat desa.
4. Agar dana desa secepatnya dapat dicairkan dan digunakan, maka perlu adanya penyederhanaan administrasi untuk daerah dan desa.
5. Menolak Usulan Banggar untuk meniadakan audit BPKP dengan alasan percepatan pencairan dana Desa.

Demikian,

Yenny Sucipto Sekjen FITRA

081333111446

Apung Widadi Manager Advokasi

085293939999

LAMPIRAN

No	Kabupaten	Modus	Kerugian	Status Hukum	Pelaku
1	Bangkalan, Jatim	Pemotongan untuk uang pengamanan	Rp. 950 juta	Penangkapan Operasi Tangkap Tangan	MF (inisial), Pj Kepala Desa (Kades) Bandang Dayah; HDK, bendahara Kecamatan Tanjungbumi; serta FH, SY, DN, dan HD selaku staf di Kecamatan Tanjungbumi.
2	Medan	pengerjaan itu tidak selesai dilakukan dan terdapat selisih dana	Rp 31 juta	dihukum tiga tahun penjara.	Mantan kepala desa payah itik
3	Malang	dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2013 dan 2014.	Rp 420 juta	Penetapan tersangka	Kades Druju, Kecamatan Sumbermanjing Wetan berinisial MJ dan Kades Sukoraharjo, Kecamatan Kepanjen, berinisial IB
4	Seram Bagian Timur,	dugaan korupsi penyalahgunaan dana desa pada tahun 2015	Dari total anggaran berkisar Rp. 250 – Rp. 300 juta per desa, sekitar 30% disalahgunakan.	Penetapan tersangka	Kepala Desa Kilimuri; SFG, Kepala Desa Undur; ARW, Kepala Desa Kian Darat; MSK, Kepala Desa Kilwaru; AM, Kepala Desa Miran Manaban; dan IGK, Kepala Desa Rurat
5	Tangerang	Penyelewengan dana desa	Rp. 383 juta	pengecekan dan pengumpulan informasi	kepala desa di Kecamatan Balaraja,
6	Bima	menyelewengkan alokasi dana desa (ADD)	Rp. 500 juta per desa	pengecekan dan pengumpulan informasi	9 desa yang dilaporkan berasal dari berbagai kecamatan di Bima, di antaranya Kecamatan Monta, Sape, dan Palibelo
7	Wonogiri	penyalahgunaan dana	Rp. 416 Juta	tersangka	Kepala Desa (Kades) Songbledek, Paranggupito,
8	Semarang	korupsi Alokasi Dana Desa (ADD)		persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)	Kepala Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo (nonaktif), Samidin
9	Mojokerto	Dugaan Penyalahgunaan dana desa (DD)	Rp. 200-300 juta per termin per desa.	pengecekan dan pengumpulan informasi	15 kepala desa yang diperiksa antara lain Kades Wonodadi Kecamatan Kutorejo, Kades Bakalan Kecamatan Gondang, Kades Watesumpak Kecamatan Trowulan, Kades Brangkal dan Jampirogo Kecamatan Sooko, Kades Jasem, Purwojati dan Wotanmas Jedong Kecamatan Ngoro, Kades Kintelan dan Medali Kecamatan Puri, Kades Nogosari, Padusan, Candiawatu

					dan Cempokolimo Kecamatan Pacet serta Kades Sugeng Kecamatan Trawas.
10	Kudus	Dugaan dikorupsi bersumber dari beberapa pos anggaran di antaranya dari dana bantuan gubernur Rp50 juta, alokasi dana desa (ADD) Rp108 juta, dana desa Rp243.727.200, dana bagi hasil retribusi pajak Rp25.155.200, dan uang kas desa Rp6 juta	Rp. 432 juta	tersangka	Kepala Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus,
11	Pakpak Barat, Sumatra Utara	Penyalahgunaan wewenang	Rp. 280 juta	Tersangka	Kepala Desa Lae Merempat, Pendi Solin
12	Pekanbaru	memalsukan tanda tangan pelapor yang menjabat sebagai penghulu atau Kepala Desa Langkai agar dana tersebut bisa diambil	Rp. 520 juta	tersangka	Bendahara desa Desa Langkai Kecamatan Siak
13	Mahakam Hulu	Tidak sesuai dengan peruntukan, seharusnya untuk infratraktur desa malah digunakan untuk merehap kantor desa	-	Masih di tindak lanjuti	Kepala Desa Batu Majang
14	Karo	Kesalahan adminitrasi dalam pertanggungjawaban penggunaan ADD di desa	Rp. 478 juta	Tersangka	Kepala desa Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo
15	Kutai Barat	Dibuat untuk melanjutkan pembangunan sebelumnya berupa gedung serba guna, akan tetapi masih mangkrak karena dana keburu habis	Rp279,36 juta	Masih di tindak lanjuti	Kepala desa muara hujan